
Alasan Intervensi Kanada Terhadap Kasus Penangkapan Aktivis HAM di Arab Saudi Tahun 2018

Ribka Agi Sitepu¹⁾, Putu Ratih Kumala Dewi²⁾, A.A Bagus Surya Widya Nugraha³⁾

^{1,2,3)}Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Abstrak

Tulisan ini menganalisis alasan mengapa Kanada melakukan intervensi terhadap kasus penangkapan aktivis HAM bernama Samar Badawi di Arab Saudi Tahun 2018. Sebelum adanya kasus ini, hubungan kerja sama Kanada dan Arab Saudi berjalan dengan baik. Dalam Hal ini, Kanada telah melakukan *Low Coercion Intervention* atau intervensi lunak berupa pidato atau pernyataan sikap atas kondisi dalam negeri Arab Saudi. Intervensi tersebut kemudian yang akhirnya menjadi pemicu dan menyebabkan putusnya hubungan diplomatik kedua negara. Sikap yang diambil Arab Saudi atas kasus ini adalah memulangkan Duta Besar Kanada untuk Arab Saudi dan menarik Duta Besarnya di Kanada. Kemudian, melakukan penarikan mahasiswa Arab Saudi di Kanada, penutupan akses penerbangan di antara kedua negara dan lainnya. Di bawah pemerintahan Justin F. Trudeau, isu HAM merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian karena merupakan isu internasional. Dengan metode kualitatif deskriptif menggunakan teori Kebijakan Luar Negeri dan Politik Domestik oleh William D. Coplin untuk menjawab rumusan masalah. Coplin menyatakan bahwa terdapat empat determinan yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri suatu negara. Konteks Internasional, Politik Domestik, Perilaku Pengambil Keputusan, serta Ekonomi dan Militer. Dalam penulisan ini, dengan menggunakan determinan yang disampaikan Coplin, Politik Domestik adalah yang kemudian penulis gunakan menjadi pisau penelitian. Politik Domestik ditentukan oleh aktor-aktor yang dibagi menjadi empat dan disebut sebagai *Policy influencer* yang kemudian 2 dari aktor tersebut, yaitu bureaucratic influencer dan partisan influencer menjawab alasan Kanada melakukan intervensi terhadap Arab Saudi pada tahun 2018.

Kata-kunci : Hak Asasi Manusia, Hubungan Diplomatik, Intervensi, Kebijakan Luar Negeri, Politik Domestik, *Policy Influencer*

Abstract

This article analyse the reasons of Canada's intervention in the case of the detention of Human Rights activists named Samar Badawi in Saudi Arabia in 2018. Before the problems heppened, the relations between two countries were good. In this case, Canada has carried ouw Low Coercion Intervention in the form of speeches and statements of the Human Rights Activist in Saudi Arabia. The intervention then led to a break in diplomatic relations bwtween Canada and Saudi Arabia. The severing of diplomatic relations was followed by the repatriation of the Canada's Ambassador in Saudi Arabia back to Canada and repatriation of Saudi Arabia's Ambassador back to Riyadh. There actions were followed by any cases, the transferred of Saudi Arabian students in Canada, stop the flight from and to Canada. Under the government of F. Trudeau, Human

Rights is one of so many international issues that took Canada's and Canada's foreign policy's attention. Using descriptive method based on the theory of Foreign Policy and Domestic Politics by William D. Coplin there are four determinants that influence the country's policy. There are International Context, Economic and Military, Domestic Politic, and decision making behavior. The writers of this article is using the Domestic Politic consideration to analyze. There are four actors, and the writers using two actors, bureaucratic policy and partisan influencers that influence domestic policy and referred to as Policy Influencers. The teory then, explained the reasons of Canada's Intervention in Saudi Arabia.

Keywords : *Diplomatic Relations, Foreign Policy, Human Rights, Intervention, Policy Influencer*

Kontak Penulis

Ribka Agi Sitepu

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana
Denpasar, 80114

E-mail : ribkaagisitepu@gmail.com

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah permasalahan yang masih banyak terjadi dan menjadi perhatian dunia. Komisi HAM PBB kemudian membentuk deklarasi terkait HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). *Amnesty International* pada tahun 2014 melakukan investigasi yang menyatakan negara banyak negara-negara di Arab yang menghadapi masalah ini. Seperti negara Bahrain, yang terdapat dalam tulisan Patty, Priadarsini dan Dewi, pemerintah Bahrain telah melakukan pelanggaran HAM melalui tindakan yang menindas rakyat seperti pemerintahan yang diktator, korup dan otoriter (Patty et al., 2023). Selain Bahrain, ada Arab Saudi yang pelanggaran HAMnya disoroti karena Arab Saudi merupakan negara dengan tingkat pelanggaran HAM yang tinggi dan tingkat kebebasan berpendapat yang rendah. (Amnesty Internasional, 2014).

Arab Saudi kerap kali melakukan penahanan aktivis HAM tanpa dakwaan dan hukuman yang jelas dan adil. Samar Badawi adalah seorang aktivis Hak Asasi Perempuan di Arab Saudi. Ia memperjuangkan hak-hak perempuan. Pada 30 Juli 2018, Samar Badawi ditangkap dan ditahan oleh pemerintah Arab Saudi. Kanada kemudian mengkritik dan menuntut pembebasan terhadap Samar Badawi beserta aktivis HAM lainnya. Hal tersebut kemudian menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik terhadap Kanada oleh Arab Saudi.

Arab Saudi merasa sikap yang diambil oleh Kanada tidak menghormati kedaulatan Arab Saudi, dan terlalu mencampuri urusan dalam negeri Arab Saudi secara terang-terangan karena dilakukan di ranah publik yaitu media sosial *Twitter*. Kanada telah melakukan intervensi. Hal tersebut kemudian membuat Arab Saudi mengambil sikap tegas

dengan cara memutuskan hubungan diplomatik dengan Kanada. Sikap tegas Arab Saudi ini kemudian tidak membuat Kanada menarik kembali pernyataan mereka.

Sejak tahun 2015, di bawah pemerintahan Justin F. Trudeau dari Partai Liberal, Kanada sangat menggaungkan mengenai *Canada's Back* yang mana di dalamnya berkaitan dengan perlindungan terhadap HAM domestik dan internasional. Partai Liberal percaya atas hak-hak dasar dan kebebasan setiap individu penting untuk sebuah negara. Partai Liberal memiliki pandangan yang kuat serta komitmen yang kuat terkait HAM (Liberal Party of Canada, 2014). Kanada juga melakukan intervensi pada kasus HAM di negara-negara lainnya seperti di Myanmar dan Ukraina.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang, penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai apa yang menjadi alasan Kanada melakukan intervensi terhadap kasus penangkapan aktivis HAM di Arab Saudi pada tahun 2018.

Penelitian ini menggunakan tiga literatur sebagai kajian pustaka, yang pertama adalah literatur dari Nila Oktaverina tahun 2016 dengan judul Tujuan Korea Selatan Mengusulkan Pembentukan ASEAN-Korea Forest Cooperation (AFoCo). Tulisan Oktaverina memaparkan mengenai bagaimana masalah perubahan iklim menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan dan hubungannya dengan perubahan kebijakan luar negeri Korea Selatan sebagai negara industri yang berkomitmen untuk mengambil bagian dalam hal mengurangi jumlah karbon.

Komitmen Korea Selatan tersebut berkaitan dengan Visi Nasional Korea Selatan yaitu *Low Carbon, Green Growth*. Korea Selatan membutuhkan pelet kayu sebagai sumber energi yang ramah lingkungan. Akan tetapi,

Korea Selatan tidak mampu memenuhi kebutuhan sumber energinya sehingga Korea Selatan membentuk AFoCo. Tulisan ini membantu penulis untuk melihat bagaimana kemudian proses pengambilan kebijakan luar negeri suatu negara berdasarkan kepentingan dalam negerinya. Tulisan ini menggunakan konsep K.J Holsti yang menyatakan terdapat tiga kategori tujuan yang ingin dicapai suatu negara melalui kebijakan luar negeri, yaitu kepentingan utama, jangka menengah dan jangka panjang. Tulisan ini menggunakan tujuan jangka menengah, usaha pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Oktaverina, 2016).

Literatur kedua adalah tulisan dari Sevira Marsanti Utari, Alasan Kanada Meratifikasi Perjanjian Paris Setelah Keluar Dari Protokol Kyoto yang ditulis oleh Sevira Marsanti Utari tahun 2018. Tulisan ini menjelaskan bagaimana Kanada bergabung dalam Protokol Kyoto (*Kyoto Protocol*) tahun 1997 dan menjadi salah satu negara yang memimpin dalam isu perubahan iklim yang pada tahun 2011 memutuskan untuk keluar dari Protokol Kyoto dan kembali lagi untuk ambil bagian dalam Perjanjian Paris (*Paris Agreement*). Penelitian ini menggunakan dua konsep yaitu Kepatuhan Rezim dan Politik Domestik.

Penelitian Utari (2018) menjelaskan alasan Kanada meratifikasi Perjanjian Paris setelah keluar dari Protokol Kyoto. Ada perubahan sikap Kanada terhadap dua kebijakan terkait perubahan iklim tersebut. Kanada menjadi satu-satunya negara yang keluar dari Protokol Kyoto dan kemudian melakukan ratifikasi atas Perjanjian Paris. Penelitian ini menggunakan Konsep Peran Politik Domestik. Pada konsep politik domestik ada keterkaitan kebijakan domestik dengan internasional dengan Kebijakan Luar

Negeri. Adapun yang mempengaruhi level domestik adalah kelompok domestik memiliki kepentingan dan yang kedua adalah politikus yang berusaha untuk mendapatkan kekuasaan.

Negara merupakan representasi dari aktor-aktor domestik, seperti pemerintah atau partai politik yang sedang berkuasa. Politik domestik mempengaruhi kebijakan luar negeri Kanada terhadap kedua kebijakan perubahan iklim tersebut. Partai politik adalah aktor domestik yang mempengaruhi kebijakan Kanada.

Literatur yang ketiga berjudul Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi Terhadap Kanada Tahun 2018 oleh Nofebry Rahmalita tahun 2019. Pada Tahun 2014, Arab Saudi dan Kanada pernah menjadi mitra dalam bidang perdagangan senjata. Adanya ketidaksesuaian prinsip terkait HAM di kesepakatan ini kemudian membuat Kanada menanggguhkan kerja sama dan menimbulkan ketegangan antara negara. Pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi terhadap Kanada pada tanggal 6 Agustus 2018 adalah puncak konflik kedua negara. Pemutusan Hubungan Diplomatik ini mencakup segala aspek kerja sama. Hal ini disebabkan oleh kritikan Kanada terhadap penegakan HAM di Arab Saudi terkait penahanan aktivis HAM bernama Samar Badawi. Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland menuntut pembebasan terhadap aktivis HAM bernama Samar Badawi di Arab Saudi. Kritik ini disampaikan Chrystia melalui Media Sosial *Twitter*.

Perbedaan tulisan ini dengan literatur sebelumnya adalah, tulisan ini meneliti apa alasan yang membuat Kanada, kemudian melakukan intervensi, yakni dengan mengancam kasus penangkapan aktivis HAM di Arab Saudi. Tindakan intervensi lunak,

yakni unggahan yang berisi kecaman dan tuntutan pembebasan yang kemudian menyebabkan konflik dengan Arab Saudi. Tindakan tersebut kemudian tidak membuat Kanada menarik kembali apa yang menjadi komitmennya terhadap penegakan HAM.

Arab Saudi langsung memutuskan Hubungan Diplomatik dengan Kanada. Arab Saudi menganggap Kanada sudah melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri Kerajaan serta serangan terhadap kedaulatan Arab Saudi. Oleh sebab itu, Kanada harus ditindak secara tegas.

Menurut teori pengambilan Keputusan Luar Negeri oleh William D. Coplin, ada empat determinan pertimbangan yang mempengaruhi pengambilan suatu Keputusan Luar Negeri, diantaranya adalah : politik dalam negeri, kondisi ekonomi dan militer, peran pengambil kebijakan serta konteks internasional. Adapun alasan Arab Saudi memutuskan hubungan Diplomatik terhadap Kanada adalah, Arab Saudi sebagai negara yang kuat, kemudian tidak terpengaruh dengan putusnya hubungan diplomatik dengan Kanada. Keluarga kerajaan yang memiliki pengaruh yang besar terhadap pengambilan keputusan, memberikan dukungan penuh pada keputusan pemutusan hubungan Diplomatik Arab Saudi terhadap Kanada, sehingga tidak mempengaruhi kondisi politik dalam negeri Arab Saudi.

Analisa Coplin difokuskan terhadap hubungan antara pengambil keputusan politik luar negeri dan aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi perilaku politik luar negeri suatu negara. Coplin memakai istilah *policy influencer* terhadap aspek atau aktor-aktor yang mempengaruhi kebijakan dan pengambilan keputusan luar negeri tersebut. *Policy influencer* ini terbagi menjadi

empat kategori, yaitu *Bureaucratic influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer*, *Mass Influencer*. Tulisan ini kemudian memilih *Bureaucratic influencer* sebagai aktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut.

Penulis kemudian memakai dua konsep dalam menganalisis untuk menjawab rumusan masalah dari tulisan ini. Konsep Kebijakan Luar Negeri dan Konsep Politik Domestik. Menurut William D. Coplin, Kebijakan Luar Negeri berkaitan dengan politik Luar Negeri yang kemudian dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu kebijakan umum, keputusan administratif dan keputusan kritis. Kategori kebijakan umum merupakan keputusan pernyataan dan kebijakan serta tindakan langsung. Kategori keputusan administratif menyangkut kondisi yang spesifik dan terbatas oleh ruang, lingkup dan waktunya. Keputusan kategori yang bersifat kritis menyangkut kondisi khusus yang membawa konsekuensi jangka panjang.

Empat Determinan konsep kebijakan Luar Negeri menurut Coplin, yaitu :

1. Politik Domestik : Situasi politik dalam negeri suatu negara memberikan pengaruh yang besar dalam merumuskan suatu kebijakan luar negeri. *Policy Influencer* adalah aktor-aktir politik dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang terdiri dari empat aktor, yaitu : *Bureaucratic Influencer*, *Partisan Influencer*, *Interest Influencer* dan *Mass Influencer*. Pengambil keputusan, membutuhkan dukungan dari *policy influencer*.
2. Kondisi Ekonomi dan Militer : Kemampuan Ekonomi dan Militer suatu negara merupakan faktor yang juga penting dalam memahami kebijakan suatu negara. Komitmen yang diambil oleh suatu negara, harus diimbangi

dengan kemampuan ekonomi dan militernya. Kemampuan ekonomi dan militer erat juga kaitannya dengan unsur geografis negara berupa kemampuan negara mempertahankan keamanannya dari kemungkinan ancaman yang datang dari luar ataupun dari dalam. Kondisi ekonomi dan militer harus dipertimbangkan pengambil kebijakan dalam membuat kebijakan luar negeri mereka (Coplin, 2003).

3. Konteks Internasional : Coplin menyatakan ada tiga elemen penting dalam membahas dampak konteks internasional terhadap politik luar negeri suatu negara, yaitu elemen geografis, elemen ekonomis dan elemen politis. Lingkungan internasional setiap negara terdiri atas lokasi dimana ia berdiri, kaitan serta hubungannya dengan negara lain (Coplin, 2003 hal : 167).
4. Perilaku Pengambil Keputusan : Rosenau (Coplin, 2003 hal 168) menyebutkan bahwa peran kepribadian dan perilaku individual dalam politik luar negeri dalam proses politik luar negeri tidak bisa diramalkan. Peran pengambil keputusan seperti pemimpin yang khas, dapat menjelaskan keseluruhan politik luar negeri.

Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis menggunakan determinan Politik Domestik dari Coplin. Pemilihan konsideran Politik Domestik menjadi pisau analisis adalah karena, keadaan Politik Dalam Negeri Kanada sangat mempengaruhi arah Kebijakan Luar Negeri Kanada di bawah Pemerintahan Justin Trudeau.

Konsep Politik Domestik, oleh William D. Coplin (Andini, 2017 Hal. 5) melihat situasi suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar

negeri. Meskipun negara merupakan aktor, akan tetapi ada aktor lain, yakni para pengambil keputusan yang bertanggung jawab dalam membuat dan mengambil keputusan. Kebijakan yang diambil oleh suatu berdasarkan pada pertimbangan dari determinan-determinan tersebut. Namun, di beberapa negara, terdapat pemimpin negara yang memiliki peran yang dominan dalam proses pengambilan keputusan. Sebagai contoh, Presiden Duterte di Filipina yang mengeluarkan kebijakan *war on drugs*. Duterte memberlakukan hukuman mati pada para tersangka narkoba demi memberantas narkoba di Filipina (Santi., et. al, 2023).

Situasi politik dalam negeri suatu negara memberikan pengaruh yang besar terhadap perumusan kebijakan luar negeri. *Policy Influencer* adalah aktor-aktor politik dalam negeri yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. *Policy influencer* berperan dalam memberikan dukungan dalam memperkuat pengambilan kebijakan. *Policy influencer* terdiri dari empat kategori, diantaranya :

1. *Bureaucratic influencer,*
2. *Partisan influencer,*
3. *Interest influencers,*
4. *Mass Influencers,*

Menurut Politik Domestik, negara merupakan representasi dari aktor-aktor politik dalam negeri. Konsep Politik Domestik membantu penulis dalam menganalisis perubahan arah kebijakan luar negeri Kanada. Pengambilan Kebijakan Luar Negeri berkaitan dengan Politik Domestik. Keadaan Politik Domestik dalam negeri kemudian menjadi salah satu konsep yang mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri yang dipilih penulis untuk dianalisis. Kondisi politik dalam negeri memiliki peran yang signifikan dalam penyusunan politik Luar Negeri karena adanya keterkaitan domestik

dengan internasional. Aktor politik dalam negeri mempengaruhi aktor pengambil kebijakan luar negeri. Kondisi ini membantu penulis dalam melakukan penelitian ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Suryabrata (2014) penelitian deskriptif adalah penelitian yang menjabarkan situasi ataupun kejadian secara sistematis, faktual, dan akurat. Penelitian ini berusaha untuk meneliti kehidupan sosial dengan cara ilmiah dengan menggunakan teknik pengumpulan data dari individu maupun dari sumber lain (Martono, 2015). Secara deskriptif, penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan terkait alasan Kanada mengintervensi kasus penangkapan aktivis HAM di Arab Saudi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara mengumpulkan data dari berbagai media seperti buku-buku, jurnal, skripsi maupun berita *online*, dan lainnya.

Tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah negara. Menurut Mochtar Mas'ued, untuk analisis dalam penelitian sangat diperlukan untuk mengkaji fenomena sosial agar analisis yang dilakukan dapat menjadi lebih fokus dan mendalam. Tingkat analisis bertujuan untuk membantu peneliti dalam memilah serta memilih faktor yang mempengaruhi analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia di Arab Saudi

Muhammad Hafiz dalam tulisannya, *Dinamika Hukum dan HAM di Negara-Negara Muslim* (Hafiz, 2013, hal. 202) menuliskan bahwa, Negara-negara Islam sering kali menghadapi situasi yang menjebak dan juga situasi yang dilematis.

Negara ini bingung dalam menentukan sikap untuk bersikap secara eksklusif dan idealis dengan mempertahankan prinsip HAM sesuai dengan prinsip hukum Islam, atau menjalankan prinsip HAM yang universal melalui *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Hukum dalam Islam yang berlandaskan pada al-qur'an sering dinilai negatif oleh pandangan prinsip universal karena tidak sesuai dengan nilai kehidupan kontemporer (Hafiz, 2013). Islam meyakini bahwa hukum terkait HAM yang berdasarkan pada al-qur'an merupakan hal yang benar.

Organisasi Kerja sama Islam (OKI), membentuk lembaga inti terkait HAM yaitu, *Independent Permanent Human Rights Commission* (IPHRC). IPHRC akan melakukan promosi HAM dalam bidang Hak Sipil, Hak Sosial dan Ekonomi berdasarkan HAM dan nilai Islam. IPHRC berperan dalam hal memberikan bantuan terhadap negara-negara anggota OKI untuk menjamin, mengawasi serta melakukan peninjauan terkait kepatuhan negara anggota dalam melindungi HAM, Hak Perempuan, Hak Anak-anak serta penghapusan kekerasan dan diskriminasi (Cantika dan Gonda, 2022). Upaya-upaya yang telah dilakukan pun kemudian tidak sepenuhnya berhasil dalam mencapai penegakan HAM di negara-negara anggota OKI. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penegakan HAM di negara-negara anggota yang masih jauh dari semestinya seperti Arab Saudi yang merupakan negara dengan tingkat pelanggaran HAM yang cukup tinggi dan kebebasan berpendapat paling rendah.

Pemerintah Arab Saudi sering kali menggunakan berbagai tindakan represif untuk menekan aktivitas penegakan HAM. Loujain al-Hahloul, Eman al-Nafjan, Samar Badawi adalah beberapa nama aktivis HAM yang ditangkap dan diadili begitupun masih banyak lagi aktivis lainnya (Amnesty

International Canada, 2021). Loujain al-Hathloul merupakan salah satu aktivis HAM yang ditahanselama 73 hari. Eman al-Nafjan adalah seorang aktivis, asisten profesor linguistik dan juga *blogger* salah satu penulis di blog SaudiWoman yang ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2013 (ALQST, Loujain al-Hathloul Personal Information, 2021).

Kemudian ada Samar Badawi. Seorang Aktivis HAM yang telah berulang kali menjadi sasaran dan diinterogasi oleh otoritas Arab Saudi karena aksinya. Ia pernah dipenjarakan selama 7 bulan masa tahanan. Samar Badawi ikut serta dalam kampanye larangan mengemudi *The Women to Drive Movement* (The Women to Drive Movement, 2023). Ia berjuang untuk menunjukkan bahwa tidak ada dasar hukum yang dapat menuntut perempuan yang mengemudi. Pada bulan September tahun 2014, Samar Badawi berkesempatan untuk berpidato pada sesi Komisi Hak Asasi Manusia PBB atau *United Nations Commission on Human Rights* (UNHCR) di Jenewa. Ia berbicara mengenai isu penindasan terhadap para aktivis HAM di Arab Saudi dan penahanan suaminya. Ia juga melakukan kunjungan ke Amerika Serikat.

Selama melakukan kunjungan ini, ia juga mendapat banyak ancaman dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi yang memintanya berhenti melanjutkan aksinya. Ia pun menyampaikan hal ini kepada berbagai organisasi HAM. Sekembalinya dari Amerika Serikat, paspornya disita. Pada tanggal 12 Januari tahun 2016, Samar Badawi kembali ditangkap dan diinterogasi. Ia ditangkap karena melakukan kampanye terkait pembebasan mantan suaminya Waleed Abu al-Khair melalui media sosial *Twitter*. Mantan suami Samar Badawi merupakan pengacara dan aktivis HAM telah membela banyak korban pelanggaran HAM. Dia adalah

pengacara Raif Badawi, yang merupakan saudara laki-laki dari mantan istrinya Samar Badawi seorang *blogger* terkenal Arab Saudi yang pada Juli 2013 dijatuhi hukuman 7 tahun penjara dan 600 cambukan. Pada tahun 2014, Waleed Abu al-Khair dijatuhi hukuman 10 tahun penjara, seribu cambukan, larangan bepergian selama 15 tahun dan denda sekitar 53.000 dollar Amerika.

Pada bulan Februari tahun 2017, Samar Badawi kembali ditahan dan diinterogasi selama beberapa jam sebelum akhirnya dibebaskan. Pada tanggal 30 Juli 2018, dia kembali ditahan. Persekusi yang tidak kunjung usai terhadap aktivis pembela HAM di Arab Saudi adalah tanda bahwa perubahan masih jauh dari harapan.

Hubungan Bilateral Kanada dan Arab Saudi

Arab Saudi merupakan mitra yang penting bagi Kanada. Arab Saudi memiliki pengaruh regional dan global yang signifikan. Awal mula hubungan diplomatik antara Kanada dan Arab Saudi sudah dimulai kurang lebih sekitar tahun 1993. Terjalinnnya hubungan diantara negara adalah karena adanya kepentingan bersama dalam berbagai bidang. Pada tahun 1993, Kanada melakukan ekspor *Light Armoured Vehicles* (LAV) atau Kendaraan Lapis Baja Ringan beserta suku cadang, sistem senjata dan data-data teknis ke Arab Saudi. Kerja sama yang dijalin oleh kedua negara terkait dengan isu perdamaian, keamanan. Pada tahun 2014, pemerintah Kanada memenangkan kontrak penjualan kendaraan militer ke Arab Saudi. Kerja sama ini menguntungkan bagi kedua negara.

Hubungan bilateral Kanada dan Arab Saudi juga mencakup kepentingan bersama dalam banyak masalah perdamaian dan keamanan termasuk keamanan energi dan keamanan kemanusiaan serta kontra-terorisme. Kanada menjalin kerja sama militer

dengan Arab Saudi mengingat Arab Saudi merupakan negara yang memimpin di wilayah Timur Tengah. Kanada dan Arab Saudi memperluas perjanjian kerja sama terkait transportasi udara. Maskapai mendapatkan kebebasan atau *flexibilitas* dalam penambahan penentuan rute dan harga bagi kedua negara. Perjanjian ini mendukung tercapainya tujuan perdagangan Internasional dan memperkuat hubungan ekonomi Kanada dan Arab Saudi. Kanada dan Arab Saudi memiliki kesepakatan dan kerja sama dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Pada tahun 2010 ada *Memorandum Of Understanding* (MOU) perawatan kesehatan antara Kanada dan Arab Saudi. Lebih dari 10.000 pelajar dari Arab Saudi disponsori oleh pemerintah untuk belajar di Kanada, termasuk 800 dokter dan mahasiswa kedokteran yang sedang melanjutkan studi di Rumah Sakit dan Universitas di Kanada (Utami, 2019).

Hubungan bilateral yang dijalin Kanada dan Arab Saudi memiliki pasang surut. Pada tahun 2014, terjadi konflik terkait kesepakatan penjualan kendaraan baja lapis ringan (LAV) oleh Kanada terhadap Arab Saudi, mengenai pelanggaran HAM yang telah disepakati sebelumnya. Kesepakatan penjualan LAV tersebut kemudian ditangguhkan (Utami, 2019, hal.32).

Ketegangan hubungan Kanada dan Arab Saudi juga terjadi pada Agustus tahun 2018. Hal ini dipicu oleh adanya penahanan yang terjadi pada tanggal 30 Juli 2018, terhadap salah satu aktivis HAM Arab Saudi, Samar Badawi. Kasus penangkapan ini kemudian menarik perhatian Kanada. Kanada kemudian bereaksi dan menyuarakan kritik atas tindakan tersebut serta menuntut pembebasan terhadap Samar Badawi (ALQST, 2018). Kanada melalui Menteri Luar

Negerinya Chrystia Freeland menyoroti penahanan tersebut. Chrystia menyampaikan kritik tersebut melalui media sosial *Twitter*. Chrystia meminta pemerintah Arab Saudi agar membebaskan Samar Badawi beserta saudara laki-lakinya.



Gambar 1. Unggahan Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland.

Kritik terhadap kasus penahanan tersebut disuarakan juga melalui akun media sosial *Twitter* Kementerian Luar Negeri Kanada. Pemerintah Kanada mendesak pemerintah Arab Saudi untuk mengkaji kembali dan segera membebaskan Samar dan Raif Badawi beserta aktivis HAM.



Gambar 1.2 Unggahan Kementerian Luar Negeri Kanada.

Kritik dari Kanada tersebut kemudian mendapatkan reaksi yang cepat dari Pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi memberikan status *persona non grata* terhadap Duta Besar Kanada di Arab Saudi. Arab Saudi memulangkan Dennis Horak, Duta Besar

Kanada di Riyadh dan Menarik Duta Besarnya dari Kanada. Pemerintah Arab Saudi menyatakan kekecewaannya atas intervensi yang dilakukan oleh Kanada.

Intervensi merupakan suatu tindakan dalam politik internasional terkait dengan tindakan suatu negara yang ikut campur dalam urusan negara lain. Ada Intervensi yang bersifat keras atau dikenal dengan istilah *High Coercion* dan ada intervensi yang bersifat lunak atau *Low Coercion*. Intervensi yang bersifat keras pada umumnya melibatkan militer seperti perang terbatas ataupun invasi militer. Sedangkan Intervensi lunak dapat berupa pidato atau pernyataan, bantuan ekonomi, penyiaran seperti melakukan propaganda radio atau televisi dan berupa bantuan militer. Berkaitan dengan hal ini, campur tangan atau intervensi yang dilakukan Kanada termasuk ke dalam intervensi lunak (Satnyoto, 2017. Hal. 211-214). Kanada melakukan campur tangan dengan mengeluarkan pernyataan yang mengecam aksi pemerintah Arab Saudi terhadap HAM.

Perubahan Kebijakan Luar Negeri Kanada Terhadap Arab Saudi

Berdasarkan teori pengambilan keputusan luar negeri menurut William D. Coplin (Coplin, 2003, Hal. 33-34) terdapat tiga kategori kebijakan luar negeri berdasarkan politik luar negeri. Keputusan umum, keputusan administratif dan keputusan kritis. Keputusan Kanada ini merupakan kombinasi dari kebijakan umum dan keputusan administratif. Keputusan ini menandai adanya pergeseran politik dalam negeri. Keputusan krisis ini sering terjadi dalam proses pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara. Pada keputusan ini, pengambil kebijakan dituntut untuk mengambil keputusan dalam waktu singkat yang kemudian dapat menimbulkan

konsekuensi tertentu bagi kebijakan luar negeri. Keputusan Kanada dalam melakukan intervensi terhadap kasus penangkapan Samar Badawi aktivis HAM di Arab Saudi merupakan Keputusan krisis. Hal tersebut dikarenakan keputusan itu merupakan kombinasi dari keputusan umum dan keputusan administratif.

Sikap tegas pemerintahan Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatik kemudian membuat Kanada mengambil keputusan krisis. Kanada yang telah mendapatkan tindakan tegas dari Arab Saudi mengambil sikap dengan cepat dan tegas atas tindakan tersebut. Pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi kemudian tidak membuat Kanada mengubah sikap. Kanada tidak akan menyerah dan akan berjuang atas HAM di seluruh dunia.

Alasan Kanada Melakukan Intervensi pada Kasus Penahanan Aktivis HAM di Arab Saudi Pada Tahun 2018

Menurut William D. Coplin ada empat determinan perilaku politik luar negeri suatu negara. Empat determinan itu adalah : kondisi politik dalam negeri, perilaku pengambil keputusan, kemampuan ekonomi dan militer, serta konteks internasional (Coplin, 2003. Hal. 165). Dalam setiap proses pengambilan kebijakan, para pengambil kebijakan akan melakukan pertimbangan terlebih dahulu. Meskipun ada empat determinan yang mempengaruhi, Coplin berpendapat bahwa, dalam proses pengambilan keputusan suatu negara, tidak semua determinan dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Hal tersebut menurut Coplin berkaitan dengan keterbatasan peran dari determinan-determinan tersebut. Sehingga, beberapa determinan hanya dapat dijelaskan secara parsial (Coplin, 2003. Hal 167).

Dalam penelitian ini, penulis memakai determinan Politik Dalam Negeri sebagai pisau analisis yang kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri Kanada.

- **Politik Domestik**

Politik domestik adalah determinan yang sangat mempengaruhi kondisi politik luar negeri Kanada dalam kasus ini. Sistem pemerintahan yang berbeda dapat menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan. Keadaan negara seperti stabilitas dan kondisi dalam negeri juga menjadi indikator pertimbangan dalam mengambil keputusan. Dalam Politik Domestik, terdapat aktor-aktor yang berperan dan memiliki pengaruh dalam perumusan Politik Luar Negeri. Oleh Coplin para aktor tersebut kemudian disebut sebagai *Policy Influencer*.

William D. Coplin membedakan *Policy influencer* ke dalam empat kategori yaitu;

1. *Bureaucratic influencer*, organisasi yang berada di dalam lembaga eksekutif pemerintah yang membantu dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kebijakan. Kelompok birokrasi biasanya mempengaruhi pengambil kebijakan dengan memberikan informasi saat perumusan dan memberikan bantuan secara administratif dalam tahap pelaksanaannya. Hal tersebut kemudian membuat kelompok birokrasi memiliki posisi yang penting dalam pembuatan kebijakan dapat menjamin bahwa kebijakan tersebut akan dipakai pada pemerintahan dan masyarakat.
2. *Partisan influencer*, merupakan partai politik atau kelompok politik yang bertujuan untuk menterjemahkan tuntutan masyarakat menjadi politis, yaitu tuntutan terhadap para pengambil keputusan terkait kebijakan pemerintah serta pengambilan kebijakan luar negeri.

Metode yang dipakai oleh *Partisan Influencer* ini adalah untuk mendesak para elit politik agar mempersiapkan pemimpin yang akan berpartisipasi dalam pengambilan kebijakan. *Partisan Influencer* tidak mampu apabila tidak disepakati oleh *Bureaucratic Influencer*. Dengan sistem terbuka, *Partisan Influencer* memberikan dukungan penuh terhadap pemerintah karena pemilihan umum sangat penting bagi *Partisan Influencer*.

3. *Interest influencers*, merupakan kelompok sekumpulan individu yang memiliki minat yang sama. Akan tetapi karena belum memiliki kekuatan, kelompok ini masih belum dapat dikatakan sebagai partai. Akan tetapi, suara mereka penting bagi para pengambil kebijakan.
4. *Mass Influencers*, merupakan opini publik yang dibentuk oleh media massa. Opini ini kemudian akan mendapatkan perhatian para pengambil kebijakan dan akan menjadi pertimbangan oleh para pengambil keputusan. Adapun efek dari *mass influencer* ini dapat bermacam-macam, hal ini tergantung dan berkaitan dengan tipe sistem politik yang ada dan berlaku di negara tersebut (Andini, 2017).

Politik domestik percaya bahwa negara bukan merupakan aktor tunggal. Negara merupakan representasi dari aktor-aktor dalam negeri, seperti pemerintah atau partai politik yang sedang berkuasa. Pengambilan keputusan Kanada dipengaruhi oleh lembaga pemerintah yaitu, anggota parlemen di bawah pemerintahan Trudeau yang didominasi partai liberal. Pemerintah federal di Kanada memiliki tanggung jawab dalam menghadapi permasalahan nasional dan permasalahan internasional. Yang bertanggung jawab adalah Kabinet menteri yang telah diatur oleh Trudeau sebagai Perdana Menteri. Partai

Liberal kemudian memiliki wewenang dalam membentuk pemerintahan, merancang dan mengeluarkan undang-undang. Parlemen Kanada juga bertugas dalam menyetujui serta memantau pengeluaran dan jalannya pemerintahan (Canada Guide).

Kanada akan lebih berfokus terhadap isu terkini, seperti Hak Asasi Manusia, penerimaan pengungsi, kesetaraan gender, keamanan, perdagangan, kerja sama internasional serta meningkatkan peran di dunia internasional. Untuk melindungi kedaulatan dan mencapai kepentingan nasional Kanada, dapat dilihat sejak awal masa pemerintahannya, Trudeau kemudian langsung menunjukkan perannya di tingkat internasional. Pemerintahan Trudeau ingin berperan dalam mengatasi perubahan iklim. Kanada pun turut meratifikasi Perjanjian Paris pada tahun 2016 (Wulandari, 2019. Hal. 22-23).

Di bawah pemerintahannya Trudeau menyatakan bahwa Kanada sangat berfokus terhadap isu-isu internasional. Pemerintahan Trudeau ini mengutamakan peran Kanada di panggung internasional. Isu-isu ini terkait dengan HAM, multilateralisme, perubahan iklim, kesetaraan gender, migrasi, pembangunan ekonomi dan lainnya. Tidak ada pengecualian bagi Kanada.

Pergeseran pandangan Politik Luar Negeri Kanada ini menandakan perubahan mengambil peran di dunia Internasional. Menurut pandangan Liberal, sangat penting untuk lebih terlibat dengan masyarakat internasional dan beradaptasi dengan isu internasional. Negara tidak boleh hanya berfokus pada isu-isu tradisional saja. Keterlibatan semua negara diperlukan untuk menyelesaikan urusan internasional, semua isu tanpa terkecuali. Kanada harus berkontribusi yang lebih dalam penyelesaian

isu permasalahan terkini bersama dengan negara lainnya. Dari keadaan Politik Domestik dan perubahan Kebijakan Luar Negeri Kanada tersebut kemudian dapat dilihat bagaimana Politik Domestik dapat menjadi determinan dalam menganalisis alasan Intervensi Kanada terhadap penangkapan aktivis HAM di Arab Saudi.

Dari empat aktor politik yang dapat mempengaruhi kebijakan Domestik suatu negara, dapat dilihat bahwa keputusan Kanada untuk melakukan intervensi terhadap kasus penangkapan aktivis HAM di Arab Saudi berkaitan dengan keadaan Politik Domestiknya. Aktor yang berperan adalah *Bureaucratic Influencer* dan *Partisan Influencer*.

Bureaucratic Influencer

Adalah Parlemen Kanada, yang merupakan pengambil kebijakan dan yang menjalankan roda pemerintahan Kanada dan didominasi oleh anggota dari Partai Liberal. Di bawah Pemerintahan Trudeau, segala arah politik dan kebijakan Domestik dan Internasional dipengaruhi oleh ideologi dan prinsip Partai Liberal. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perubahan kebijakan dari pemerintahan Konservatif sebelumnya. Parlemen Kanada mengambil peran atas tindakan Kanada membela aktivis HAM Arab Saudi.

Tindakan intervensi Kanada ini sejalan dengan perubahan arah Kebijakan Luar Negerinya yang ingin berperan dalam isu internasional yaitu HAM pada tingkat internasional. Pemutusan Hubungan yang dilakukan oleh Arab Saudi terhadap Kanada pun tidak membuat Kanada menarik pernyataan serta tindakan dan sikapnya atas kasus tersebut. Hal ini membuktikan tingkat keseriusan Kanada dalam mengambil bagian dalam isu internasional dalam bidang HAM.

Partisan Influencer

Partai Liberal merupakan aktor yang berperan dalam tindakan dan sikap Kanada terhadap penangkapan aktivis HAM di Arab Saudi tersebut. Partai Liberal adalah partai yang mengusung Trudeau menjadi Perdana Menteri dan kemudian menang. Pemilu adalah salah satu unsur yang sangat penting bagi *partisan influencer*. Pemilu merupakan bagian yang penting dari proses politik negara. Pemilu kemudian akan menentukan bagaimana masa depan suatu negara (Donovan, 2022). Di Kanada, Partai Politik yang memenangkan pemilu memiliki kekuasaan dalam melakukan serta mengatur pemerintahan. Partai Liberal kemudian menjadi pemegang roda pemerintahan Kanada dalam mengatur arah dan tujuan kebijakan dalam negeri ataupun kebijakan luar negeri Kanada.

PENUTUP

Arab Saudi, memiliki tingkat pelanggaran HAM yang tinggi, termasuk hak asasi perempuan dan hak kebebasan berpendapat. Penangkapan aktivis HAM Samar Badawi menarik perhatian Kanadayang mendesak pemerintah Arab Saudi agar segera melepaskan Samar Badawi dan aktivis HAM lainnya. Arab Saudi menganggap Kanada telah melakukan campur tangan secara terang-terangan atau intervensi atas kebijakan dalam negeri Arab Saudi. Dalam Hubungan Internasional, aksi yang dilakukan oleh Kanada tersebut merupakan tindakan Intervensi yang bersifat lunak. Intervensi dilakukan dengan cara mengeluarkan pernyataan yang mengecam kebijakan domestik Arab Saudi yang menahan aktivis HAM yang berakibat pada pemutusan hubungan diplomatik oleh Arab Saudi. Tindakan tegas Arab Saudi kemudian tidak membuat Kanada takut dan merubah sikapnya terhadap kasus tersebut.

Alasan dari tindakan yang diambil Kanada dapat dianalisis menggunakan teori Politik Domestik oleh William D. Coplin terkait aktor-aktor politik domestik yang terbagi menjadi empat dan disebut sebagai *Policy Influencer*. Terkait kasus ini, *Policy Influencer* yang mempengaruhi pengambilan kebijakan luar negeri Kanada adalah *Bureaucratic Influencer* dan *Partisan Influencer*. *Bureaucratic Influencer*, parlemen Kanada yang berada di bawah pemerintahan Trudeau yang mempengaruhi pengambilan Kebijakan Luar Negeri Kanada. Hal ini karena, kursi parlemen Kanada didominasi partai Liberal. Hal ini kemudian yang mempengaruhi pembuatan Kebijakan Luar Negeri yang sesuai dengan ideologi Partai. *Partisan Influencer* yang menentukan arah Kebijakan Politik Luar Negeri Kanada.

Partisan Influencer adalah Partai Liberal yang dalam hal ini memenangkan pemilihan federal Kanada. Aktor ini kemudian dapat menjalankan pandangannya dalam melakukan perubahan terkait arah Kebijakan Luar Negeri Kanada partai Liberal.

Daftar Pustaka

Buku

- Coplin, D. William. (2003). Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaah Teoritis. Terjemahan Marsedes Marbun. Edisi Kedua. Bandung: Sinar Baru
- Huntington, P. Samuel. (1996). The Clash Of Civilizations And The Remaking Of The World Order. New York : Simon And Schuster
- Mas'ood, Mohtar. 1989. *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis dan Teorisasi*. Yogyakarta: Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada.
- Mintz, Alex. DeRouen, Karl. 2010. *Understanding Foreign Policy Decision Making*. New York : Cambridge University Press.

Jurnal atau Karya Ilmiah

- Donovan, V., Kumala Dewi, P., &Nugraha, A. (2022). Upaya Uni Eropa dalam menekan

- kekerasan yang terjadi di Burundi pada tahun 2015 hingga 2016. DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional). 2(1), 148-162.
- Hafiz. Muhammad. "Dinamika Hukum dan Hak Asasi Manusia di Negara-Negara Muslim". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, 2013.
https://opac.uinkhas.ac.id/index.php?p=show_detail&id=18657 (Diakses Pada 27 Mei 2023)
- Nugroho. C. Andrea. (2017). "Justin Trudeau on Increasing the Role of Canada in The Internasional Stage". Bandung : Universitas Katolik Parahyangan.
<https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/4127> (Diakses Pada 3 Juli 2023)
- Oktaverina. Nila. (2016). "Tujuan Korea Selatan Mengusulkan Pembentukan AFoCo. Jember.
<http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/78836> (diakses tanggal 30 Desember 2021)
- Rahmalita. Nofebry. (2019). "Pemutusan Hubungan Diplomatik Arab Saudi Terhadap Kanada Tahun 2018". Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
<http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/31459> (diakses tanggal 8 September 2022)
- Satnyoto, Andaru. "Justifikasi Intevensi Internasional Dalam Konflik Suatu Negara" *Jurnal Asia Pasifik Studies*. Volume 1 Nomor 2. 2017 Universitas Padjajaran.
<http://ejournal.uki.ac.id> (Diakses Pada : 10 Agustus 2023)
- Utari, M. Sevira. (2018). "Alasan Kanada meratifikasi Perjanjian Paris Setelah Keluar Dari Protokol Kyoto". Surabaya : Universitas Airlangga.
https://repository.unair.ac.id/79656/3/JURNAL_Fis.HI.94%2018%20Uta%20a.pdf (diakses tanggal 6 Maret 2022)
- Puri, N. Cantika dan Yumitro Gonda. (2022). "Peran Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dalam Penguatan Diplomasi Islam". Malang : Universitas Malang
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/download/19717/11181/73115> (Diakses tanggal 23 Juni 2023)
- ALQST. 2018. "Human Rights Defenders Samar Badawi, Nasima al-Sada and Amal al-Harbi Arrested by Saudi Authorities"
<https://alqst.org/en/samar> (Diakses pada 15 Juli 2023)
- Amnesty International. (2011). "Amnesty International Annual Report 2011 - Saudi Arabia"
<https://www.refworld.org/docid/4dce1543c.html> (Diakses Pada 12 Maret 2023)
- Amnesty International. (2013). "Urgent Action Unspoken Human Rights Defender "
<https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/06/mde230232013en.pdf> (Diakses Pada 20 Mei 2023)
- Appeal for Clemency for Raif Badawi
<https://www.raoulwallenbergcentre.org/images/reports/Clemency-Appeal-Raif-Samar-Badawi.pdf> (Diakses Pada 29 Mei 2023)
- Arrests of Samar Badawi.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-000745_EN.html (Diakses pada : 7 Juni 2021)
- Canada Guide. "The Canadian Parliament System"
<https://thecanadaguide.com/government/parliament/>
- Canada Promotes Regional Security And Safety In Southeast Asia - Canada News Centre". 2016. News.Gc.Ca
<https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2016/07/canada-promotes-regional-security-and-safety-in-southeast-asia.html> (Diakses Pada : 14 Juni 2023)
- Cbc News. 2018. "Trudeau government started pressing Saudis to release Badawi long before Twitter Flap".
<https://www.cbc.ca/news/politics/badawi-saudi-trudeau-freeland-1.4785075> (Diakses Pada 3 Juni 2023)
- Government of Canada. 2015. "Canada Concerned by Punishment of Saudi Blogger".
<https://www.canada.ca/en/news/archive/2015/01/canada-concerned-punishment-saudi-blogger.html> (Diakses pada 3 Juli 2023)
- "I'm in shock" The First 24 hours of the Saudi - Canada tweet feud left Canadians reeling.

Daring

<https://globalnews.ca/> (Diakses pada : 12 Oktober 2019)

Mandate of Human Rights

<https://www.ohchr.org/en/about-us/mandate-un-human-rights#:~:text=UN%20Human%20Rights%20was%20created,protection%20of%20all%20human%20rights> (Diakses tanggal 3 Juni 2022)

Patty, A., Priadarsini, N., & Dewi, P. (2023). Framing oleh NGO Terkait Pelaksanaan Bhrain Grand Prix Sebagai Alat Sportwashing Pemerintah Bahrain Terhadap Isu Pelanggaran HAM Tahun 2011-2020. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*, 3(1), 14-25.

Pelanggaran HAM di Arab Saudi Meningkat

<https://www.dw.com/id/pelanggaran-ham-di-arab-saudi-meningkat/a-17171906> (Diakses Pada : 12 Maret 2023)

Santi, M., Kumala Dewi, P., & Parameswari, A. (2023). Analisis Model Idiosinkratik Presiden Rodrigo Roa Duterte Atas Kebijakan War on Drugs di Filipina. *DIKSHI (Diskusi Ilmiah Komunitas Hubungan Internasional)*. 3(1), 58-69.

Saudi Arabia Freezes Canada Trade Ties, Expels Canadian Ambassador

<https://www.theepochtimes.com/> (Diakses Pada : 12 Oktober 2019)

The Women to Drive Movement

<https://oct26driving.com/> (Diakses Pada 10 Mei 2023)

Trudeau defies Saudi Arabia and says Canada will stand up for human rights.

<https://www.theguardian.com/> (Diakses pada : 12 oktober 2019)